

PROYEKSI POTENSI FISKAL DKI JAKARTA 2018-2022

Yurianto

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Email: yurianto@uhamka.ac.id

Diterima: 26 Januari 2018; Direvisi: 28 Januari 2018; Disetujui: 11 Februari 2018

Abstract

The purpose of this study was to determine the fiscal potency of DKI Jakarta on 2018-2022 which cover Total Owned Resource Revenue, Fiscal Capacity, Total Revenue, Fiscal Gap, Economic Growth, Total Expenditure and Total Gross Domestic Regional Product of DKI Jakarta. This study use quantitative approach to obtain optimal results. This approach use simultaneously equation model. Simultaneously equation model are divided into five block consisting of thirty-three equation, which nineteen of them are structural equation and fourteen of them are identity equation. The results of this study showed quite promising number on economic growth of Jakarta in 2018-2022. However inflation also shows increasing number. Therefore this study recommended, for economic growth continous to grow on quality then inflation control should continue to be done with various policies especially distribution policies.

Keywords: *Governance, potention, fiscal.*

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menghitung potensi fiskal Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2022 yang meliputi total Pendapatan Asli Daerah, kapasitas fiskal, total penerimaan, celah fiskal, pertumbuhan ekonomi, total pengeluaran, dan total PDRB DKI Jakarta. Selanjutnya untuk memperoleh dan melengkapi hasil yang optimal maka dalam kajian ini digunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah menggunakan model persamaan simultan. Model persamaan simultan yang disusun terbagi menjadi lima blok yang terdiri dari 33 persamaan, dimana 19 persamaan merupakan persamaan struktural dan 14 persamaan adalah persamaan identitas. Hasil dari kajian ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta 2018-2022 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Namun dari sisi inflasi angkanya juga terus menunjukkan kenaikan. Untuk itu disarankan agar pertumbuhan ekonomi terus tumbuh berkualitas maka pengendalian inflasi harus terus juga dilakukan dengan berbagai kebijakan terutama kebijakan distribusi.

Kata Kunci: Pemerintahan, potensi, fiskal

PENDAHULUAN

Jakarta mempunyai dua peran yang strategis dalam tata pemerintahan di Indonesia yaitu sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom. DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007. Sementara sebagai daerah otonom didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta dituntut untuk memiliki fasilitas infrastruktur dan sarana prasana yang jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta juga harus tetap mensejahterakan masyarakatnya bukan hanya infrastruktur yang harus dicukupi tetapi pelayanan kepada masyarakat pun harus tetap diselenggarakan dengan baik.

Sementara sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sumber daya yang ada. Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa mengelola seluruh potensi termasuk asset dan keuangan daerah yang ada

dengan baik. Selain itu sebagai daerah otonom, DKI Jakarta dituntut untuk mempunyai pemerintahan yang solid dan mampu menyelenggarakan konsep *Good Governance*.

Selain itu, Jakarta juga merupakan pusat perekonomian dan keuangan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di tingkat regional maupun internasional. Sehingga tidak mengherankan apabila pembangunan perekonomian di DKI Jakarta menjadi barometer bagi pembangunan ekonomi nasional. Kedudukan sebagai pusat perekonomian ini menjadikan DKI Jakarta menjadi magnet bagi banyak orang dari berbagai daerah untuk mengadu nasib di Jakarta.

Konsekuensi dari berbagai peran strategis tersebut maka diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Dengan sumber dana yang ada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mampu pengelolaan dengan baik dan efektif serta efisien.

Dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dilakukan berbagai langkah kebijakan keuangan di DKI Jakarta. Secara umum arah kebijakan keuangan daerah tidak bisa dilepaskan dari berbagai aturan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah

sebagaimana yang diatur dalam: (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sejalan dengan berbagai peraturan tersebut, pengelolaan keuangan daerah terdiri atas tiga komponen utama yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

. Provinsi DKI Jakarta perlu mengkaji dan mengidentifikasi sejauh mana kapabilitas keuangan daerah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, sehingga nantinya dapat menjadi acuan dalam menggali sumber alternatif pembiayaan potensial yang dapat menopang proses pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Berbagai indikator diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai

sumber alternatif pembiayaan pembangunan di DKI Jakarta.

Indikator ekonomi bagi daerah sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini karena indikator tersebut digunakan untuk dasar perhitungan dalam penentuan target dan dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian diharapkan pembangunan DKI Jakarta akan lebih terarah dan terstruktur.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dengan telah diidentifikasinya indikator makro maka akan mempermudah dalam mengidentifikasi kemampuan fiskal daerah. Apabila fiskal daerah telah teridentifikasi akan mempermudah dalam penyusunan dan perencanaan anggaran program yang telah disusun oleh Kepala Daerah terpilih. Artinya visi dan misi Kepala Daerah terpilih akan dapat diketahui lebih awal dengan diketahuinya kemampuan fiskal daerah.

Dalam konteks ini pertanyaan yang mendasar adalah sampai seberapa besar kemampuan fiskal DKI Jakarta periode 2018-2022. Periode ini sangat kritikal karena masa ini merupakan periode tahap ke-4 dari RJPD Daerah Provinsi DKI

Jakarta 2005-2025 dan periode masa kerja Gubernur terpilih.

Sejalan dengan hal tersebut maka kajian ini bertujuan untuk menghitung potensi fiskal Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2022 yang meliputi total Pendapatan Asli Daerah, kapasitas fiskal, total penerimaan, celah fiskal, pertumbuhan ekonomi, total pengeluaran, dan total PDRB DKI Jakarta.

Pada era otonomi daerah terjadi perubahan struktural dari pengelolaan keuangan daerah yang bersifat sentralistik yang terjadi pada era orde baru menjadi pengelolaan keuangan daerah yang desentralistik pada era otonomi daerah. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk membentuk dan membangun sistem publik yang dapat menyediakan barang dan jasa publik secara lokal yang sedemikian efektif dan efisien dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Hal ini dapat dilihat dari adanya pelimpahan kewenangan kepada pemerintahan untuk mengelola belanja daerah, memungut pajak dan mengelola bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kebijakan otonomi daerah ini dimaksudkan agar dapat mempercepat

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam hal ini banyak penelitian yang memfokuskan pada otonomi daerah dengan hasil yang sangat bervariasi. Menurut Simanjuntak (2010) kebijakan otonomi daerah mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat tetapi tidak semua daerah memperoleh tingkat perbaikan kesejahteraan. Ini artinya pada daerah tertentu kebijakan fiskal tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dikemukakan juga bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan tidak mempunyai pola yang jelas.

Aktivitas perekonomian sebelum dan sesudah kebijakan fiskal pada era otonomi daerah tidak berpengaruh terhadap sektor-sektor perekonomian daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal juga tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan daerah. Ditambahkan oleh Hidayat (2010) ternyata kebijakan otonomi daerah telah mendegradasi hubungan negara dan masyarakatnya atau telah terjadi bias antar elite

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal di Indonesia masih sering diperdebatkan terutama dilihat dari sisi efektivitas dan efisiensinya jika

dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya. Kaitan dengan hal tersebut Martinez-Vazquez dan McNab (2001) mengemukakan bahwa beberapa alasan mendasar yang dilakukan oleh pemerintah di Negara berkembang untuk memilih desentralisasi fiskalnya adalah: (1) dengan adanya desentralisasi fiskal maka diharapkan pengeluaran pemerintah akan lebih efisien. (2) dengan sentralisasi fiskal diakui telah mengalami kegagalan (3) peran pemerintah daerah akan lebih besar dan pemerintah daerah tidak didikte oleh pemerintah pusat.

Di Indonesia, desentralisasi fiskal didasarkan pada Undang undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini mendeskripsikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini maka urusan fiskal daerah diserahkan kepada daerah otonom atau pemerintah daerah.

Desentralisasi fiskal di Indonesia mempunyai tujuan (1) memberikan

keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi; (2) membantu daerah dalam mendanai kewenangannya dan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah; (3) melaksanakan fungsi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah; dan (4) membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Penjelasan UU No. 33 tahun 2004). Jadi desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam kaitannya dengan kebijakan desentralisasi

fiskal agar sukses adalah bahwa kebijakan ini harus diikuti dengan kewenangan yang jelas dan efektif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakannya harus adil dan transparan terutama dalam hal transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Rodriguez-Pose dan Kroijer, 2009).

Kebijakan fiskal dapat berhasil dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya jika pemerintah daerah komitmen yang direpresentasikan dengan kebijakan yang tepat, kualitas birokrat yang memadai, dan kesadaran masyarakat terhadap pemerintahan yang konsisten. Penelitian Tiebout (1956) dalam Rodriguez-Pose dan Kroijer (2009) menemukan bahwa salah satu keuntungan dari desentralisasi fiskal adalah bahwa desentralisasi akan meningkatkan efisiensi ekonomi pemerintah lokal karena pemerintahnya akan lebih mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakatnya. Tetapi beberapa studi tentang desentralisasi fiskal menemukan bahwa kebijakan desentralisasi banyak yang tidak berhasil terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Bardhan, 2002 dalam Rodriguez-Pose dan Kroijer, 2009). Untuk itu perlu dicermati faktor

apa dalam desentralisasi fiskal yang sangat dominan dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, berdasarkan UU No 33 Tahun 2004, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Selanjutnya disebutkan pada pasal 5 UU no 33 Tahun 2004 bahwa pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sedangkan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah; penerimaan pinjaman daerah dan cadangan daerah; dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Besarnya penerimaan daerah ini akan sangat menentukan pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain besarnya penerimaan ini menentukan besarnya belanja per sektor.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana perimbangan merupakan komponen dari penerimaan daerah yang cukup besar. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum

dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan ini bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Adapun besarnya jumlah dana perimbangan setiap tahun anggaran ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pengeluaran pemerintah daerah tidak terlepas dari penerimaan daerah, karena secara teoritis pengeluaran merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Semakin tinggi penerimaan daerah semakin tinggi tingkat pengeluaran daerah. Untuk itu daerah berusaha untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan kewenangannya daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Hal inilah yang mendorong pemerintah daerah berusaha meningkatkan potensi pendapatan melalui peningkatan PAD nya agar bisa digunakan untuk belanja daerah dalam kerangka pembangunan daerah.

Investasi dalam Pembangunan Daerah

Investasi dapat diartikan sebagai istilah yang berkaitan dengan keuangan dan ekonomi. Investasi diartikan sebagai

akumulasi bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan manfaat di masa depan. Dengan demikian, maka secara ekonomi investasi berarti pembelian kapital atau modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi untuk keperluan yang akan datang.

Investasi dalam perekonomian mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam menggerakkan perekonomian. Investasi akan menimbulkan *multiplier effect* bagi perekonomian. Peningkatan investasi tidak hanya akan meningkatkan permintaan agregat tetapi juga akan meningkatkan penawaran agregat melalui meningkatnya stok kapital dan kapasitas produksi. Adanya peningkatan dari sisi stok kapital dan kapasitas produksi dapat mendorong kegiatan produksi dan pada gilirannya akan menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain investasi swasta berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Huang, 2009)

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada umumnya mempunyai pengertian meningkatnya output barang dan jasa pada wilayah tertentu dan biasanya diukur dengan

pertumbuhan nilai (GDP) *Gross Domestic Product*. Dalam hal ini ada tiga faktor atau komponen utama yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah (Todaro dan Smith, 2006). Pertama adalah berapa besar tingkat akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang dialokasikan dalam perekonomian. Kedua adalah berapa besar laju pertumbuhan penduduk yang akan menambah jumlah angkatan kerja dan yang ketiga adalah tingkat kemajuan teknologi yang akan mempengaruhi secara langsung proses produksi dan akhirnya akan meningkatkan kuantitas produksi.

Hampir sama dengan Todaro dan Smith (2006), teori pertumbuhan model Solow memfokuskan pada empat variabel, yaitu *output* (Y), *capital* (K), *labor* (L) dan *Knowledge* atau *the effectiveness* tenaga kerja (A) (Romer, 2001). Formulasi model pertumbuhan Romer adalah:

$$Y_t = F(K_t, A_t, L_t) \dots\dots\dots t$$

merupakan waktu.

Ini menunjukkan bahwa, faktor kapital sangat dominan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Disamping faktor tersebut, faktor tenaga kerja dan ilmu pengetahuan

yang dimiliki tenaga kerja tersebut juga menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dalam konteks ini, dari sisi permintaan agregat, maka peningkatan output domestik dapat diidentifikasi dengan empat komponen perekonomian, yaitu : (1) pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga (C), (2) pengeluaran investasi oleh dunia bisnis dan rumah tangga (I), (3) belanja pemerintah untuk barang dan jasa (G), dan (4) *nett eksport* (X-M) (Dornbusch, Fischer dan Startz, 2004).

Formula ini diadaptasikan oleh McCann (2006) untuk perekonomian daerah yang dikenal dengan permintaan agregate standar dari *Keynesian* untuk regional yang dapat dideskripsikan sebagai berikut.

$$Y_r = C_r + I_r + G_r + X_r - M_r$$

dimana Y_r : Pendapatan regional

I_r : Investasi regional

C_r : Konsumsi regional

G_r : Pengeluaran pemerintah daerah

X_r : Eskpor daerah

M_r : Impor daerah.

Formula di atas mengandung arti bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah sangat tergantung dari empat komponen di atas. Artinya pertumbuhan ekonomi akan meningkat jika konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor juga meningkat atau nilai total dari ke empat komponen bernilai positif.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini menggunakan data series untuk periode tahun 1987-2011. Sumber data adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, SKPD/UKPD yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Bank Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu data keuangan Provinsi DKI Jakarta, kemiskinan, PDB, inflasi dan lain-lain. Bappeda yaitu data mengenai jumlah pegawai Pemprov DKI Jakarta. Bank Indonesia (BI), yaitu tentang nilai tukar, cadangan devisa, uang beredar, dan suku bunga.

Setelah data dikumpulkan kemudian data ditabulasi sesuai dengan kepentingan kajian. Selanjutnya dilakukan analisis dari data yang telah terkumpul tersebut. Analisis yang digunakan dapat

dikelompokkan menjadi dua, yaitu analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai kondisi obyektif di lapangan. Di samping itu, analisis deskriptif juga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang.

Selanjutnya untuk memperoleh dan melengkapi hasil yang optimal maka dalam kajian ini juga digunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah menggunakan model persamaan simultan. Model persamaan simultan yang disusun terbagi menjadi lima blok yang terdiri dari 33 persamaan, dimana 19 persamaan merupakan persamaan struktural dan 14 persamaan adalah persamaan identitas. Secara lengkap persamaan-persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Blok Fiskal Penerimaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah

- $$PJK_t = a_0 + a_1PDRB_t + a_2SIUP_t + a_3POP_t + a_4D_{9899} + a_5PJK_{t-1} + u_{1t}$$
- $$RET_t = b_0 + b_1PDRB_t + b_2POP_t + b_3D_{9899} + b_4RET_{t-1} + u_{2t}$$

3. $PAD_t = PJK_t + RET_t + HSLKAYA_t + LPAD_t$
 Nilai dan tanda estimasi parameter yang diharapkan: $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3 > 0$; $b_3, a_4 < 0$; dan $0 < b_4, a_5 < 1$.

Dana Perimbangan

$$4. BHP_t = c_0 + c_1 CONCAP_t + c_2 JMKEND_t + c_3 D_{9899} + c_4 BHP_{t-1} + u_{3t}$$

$$5. BHBP_t = d_0 + d_1 PDRB_t + d_2 POP_t + d_3 D_{9899} + d_4 BHBP_{t-1} + u_{4t}$$

$$6. DAU_t = e_0 + e_1 PDRBCAP_t + e_2 CAPFIS_t + e_3 D_{9899} + e_4 DAU_{t-1} + u_{5t}$$

$$7. DBH_t = BHP_t + BHBP_t$$

$$8. DANPER_t = DAU_t + DAK_t + DBH_t$$

$$9. CAPFIS_t = PAD_t + DBH_t$$

$$10. TOTREV_t = PAD_t + DANPER_t + LPEND_t + PEMBY_t$$

Nilai dan tanda estimasi parameter yang diharapkan: $c_1, d_1, e_1, c_2, d_2 > 0$; $e_2, c_3, d_3, e_3 < 0$; dan $0 < c_4, d_4, e_4 < 1$.

Celah Fiskal

$$11. GAPFIS_t = TOTPENG_t - CAPFIS_t$$

Blok Fiskal Pengeluaran Daerah

$$12. BLJPEG_t = f_0 + f_1 CAPFIS_t + f_2 JMPEG_t + f_3 D_{9899} + f_4 BLJPEG_{t-1} + u_{6t}$$

$$13. BLJBRG_t = g_0 + g_1 CAPFIS_t + g_2 D_{9899} + g_3 BLJBRG_{t-1} + u_{7t}$$

$$14. TOTPENG_t = BLJPEG_t + BLJBRG_t + BLJLAIN_t$$

Blok PDRB

$$15. CON_t = h_0 + h_1(PDRB_t - PJK_t) + h_2 BLJPEG_t + h_3 POP_t + h_4 D_{9899} + h_5 CON_{t-1} + u_{8t}$$

$$16. CONCAP_t = CON_t / POP_t$$

$$17. INV_t = i_0 + i_1 PDRB_t + i_2 SBI_t + i_3 TABMAS_t + i_4 D_{9899} + i_5 INV_{t-1} + u_{9t}$$

$$18. GOV_t = j_0 + j_1 TOTPENG_t + j_2 D_{98} + u_{10t}$$

$$19. EKSPOR_t = k_0 + k_1 PDRB_t +$$

$$k_2 KURS_t + k_3 D_{9899} + k_4 EKSPOR_{t-1} + u_{11t}$$

$$20. IMPOR_t = l_0 + l_1 PDRB_t + l_2 KURS_t + l_3 D_{9899} + u_{12t}$$

$$21. PDRB_t = CON_t + INV_t + GOV_t + EKSPOR_t - IMPOR_t$$

$$22. PDRBCAP_t = PDRB_t / POP_t$$

$$23. RPDRB_t = PDRB_t * 100 / IHK_t$$

$$24. GROWTH_t = (RPDRB_t - RPDRB_{t-1}) / RPDRB_{t-1} * 100$$

Nilai dan tanda estimasi parameter yang diharapkan: $h_1, i_1, j_1, k_1, l_1, h_2, k_2, h_3, i_3 > 0$; $i_2, j_2, l_2, k_3, l_3, h_4, i_4 < 0$; dan $0 < k_4, h_5, i_5 < 1$.

Blok Inflasi dan Nilai Tukar

$$25. IHK_t = m_0 + m_1UANGBR_t + m_2KURS_t + m_3HECBBM_t + m_4TDL_t + m_5D_{98} + m_6IHK_{t-1} + u_{13t}$$

$$26. INFLASI_t = (IHK_t - IHK_{t-1})/IHK_{t-1} * 100$$

$$27. KURS_t = n_0 + n_1CADEV_t + n_2INFLASI_t + n_3KURS_{t-1} + u_{14t}$$

$$28. UANGBR_t = o_0 + o_1RPDRB_t + o_2SBI_t + o_3D_{98} + u_{15t}$$

Nilai dan tanda estimasi parameter yang diharapkan: $m_1, o_1, m_2, n_2, m_3, m_4 > 0$; $n_1, o_2, o_3, m_5 < 0$; dan $0 < n_3, m_6 < 1$.

Blok IPM, Kemiskinan, dan Tenaga Kerja

$$29. IPM_t = p_0 + p_1MYS_t + p_2UMP_t + u_{16t}$$

$$30. JUMIS_t = q_0 + q_1PDRBCAP_t + q_2INFLASI_t + q_3D_{9899} + q_4JUMIS_{t-1} + u_{17t}$$

$$31. TKMIS_t = JUMIS_t / POP_t * 100$$

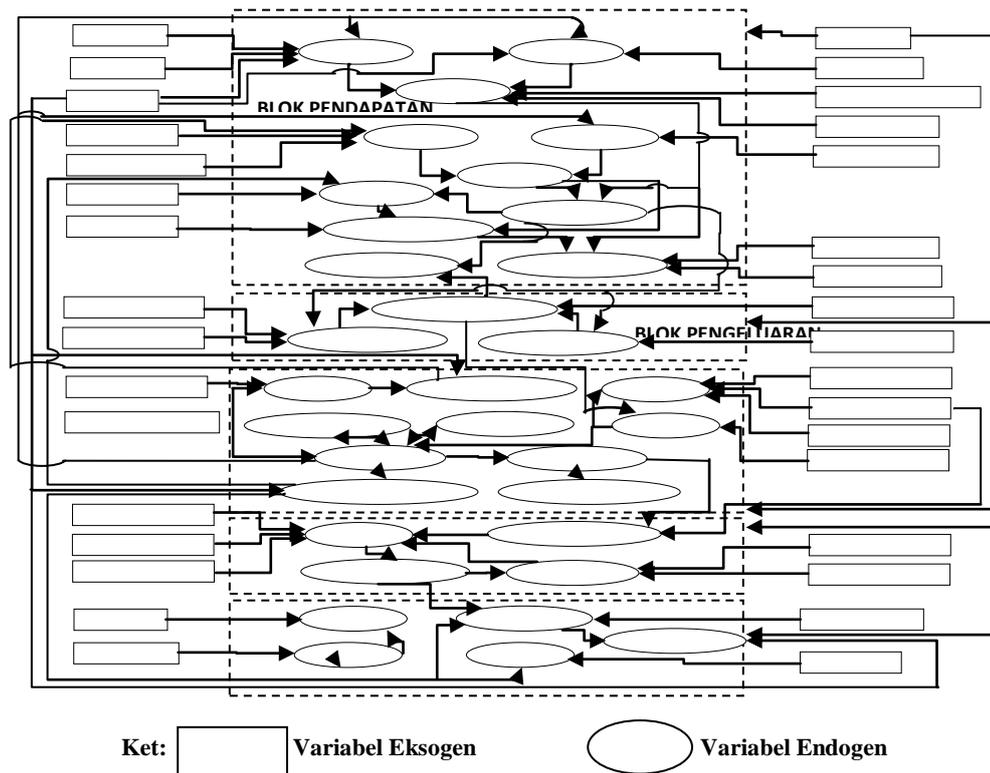
$$32. MYS_t = r_0 + r_1PDRBCAP_t + r_2D_{98} + r_3MYS_{t-1} + u_{18t}$$

$$33. TK_t = s_0 + s_1PDRBCAP_t + s_2D_{9899} + s_3TK_{t-1} + u_{19t}$$

Nilai dan tanda estimasi parameter yang diharapkan: $p_1, r_1, s_1, p_2, q_2, q_3 > 0$; $q_1, r_2, s_2 < 0$; dan $0 < r_3, s_3, q_4 < 1$.

Identifikasi Model dan Metode Estimasi

Menurut Koutsoyionis (1978), pendekatan ekonometrika dengan menggunakan sistem persamaan simultan mensyaratkan jumlah persamaan harus sama dengan jumlah variable endogen. Untuk itu diperlukan identifikasi model secara lengkap.



Gambar 1. Diagram Keterkaitan Antar Variabel dalam Model Perekonomian Provinsi DKI Jakarta

Syarat yang harus dipenuhi dalam proses identifikasi adalah *order condition of identification* yaitu bahwa jumlah variabel endogen dan eksogen yang tidak masuk dalam persamaan tetapi masuk dalam persamaan lain dalam sistem persamaan simultan tersebut harus sama dengan atau lebih besar dari jumlah variabel endogen di dalam model dikurangi satu (Gujarati, 1995). Deskripsi tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$(K - M) \geq (G - 1)$$

Keterangan:

K = jumlah variabel dalam model (variabel endogen dan predetermined)

M = jumlah variabel endogen dan eksogen yang terdapat dalam persamaan yang diidentifikasi, dan

G = jumlah persamaan dalam model, yaitu sama dengan jumlah variabel endogen dalam model

Berdasarkan order condition tersebut:

1. Jika $(K - M) > (G - M)$ maka persamaan disebut dikatakan

persamaan teridentifikasi secara berlebihan (*overidentified*).

2. Jika $(K - M) = (G - M)$ maka persamaan dikatakan teridentifikasi secara tepat (*just/exactly identified*).

3. Jika $(K - M) < (G - M)$ maka persamaan dikatakan tidak teridentifikasi (*unidentified*).

Hanya persamaan yang *exactly* dan *overidentified* saja yang parameternya dapat diestimasi berdasarkan kriteria *order condition* tersebut.

Model yang disusun terdiri dari 33 variabel endogen (G) yang terdiri dari 19 persamaan struktural dan 14 persamaan identitas. Jumlah variabel pre-determined adalah 34 variabel yang terdiri dari 19 variabel eksogen dan 15 variabel lag endogenous. Sehingga jumlah variabel yang digunakan dalam model seluruhnya berjumlah 67 variabel (K). Persamaan yang mempunyai jumlah variabel terbanyak adalah persamaan dengan 7 variabel (M) dan persamaan tersebut adalah *overidentified*. Berdasarkan kriteria *order condition*, maka model adalah *overidentified* karena seluruh persamaan struktural yang ada dalam model adalah *over identified*.

Karena model adalah *overidentified* maka *two-stage least squares* (2SLS) merupakan prosedur estimasi yang sangat bermanfaat untuk memperoleh nilai parameter struktural (Pyndyck dan Rubinfeld, 1998). Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan metode estimasi parameter 2SLS.

Kalkulasi dalam penelitian ini dilakukan untuk periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2025 dengan penekanan pada periode 2018-2022. Kondisi ini dilakukan pada stasioner artinya tidak dilakukan kebijakan apapun. Kebijakan dilaksanakan *Business as usual*. Semua perhitungan mulai dari estimasi parameter persamaan struktural, peramalan sampai dengan simulasi skenario kebijakan menggunakan bantuan software *Statistical Analysis System/Estimation Time Series* (SAS/ETS) versi 9.1.

HASIL PEMBAHASAN

Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Hasil estimasi dari model yang telah disusun selanjutnya dilakukan pengujian berdasarkan kriteria ekonomi, statistik dan ekonometrika. Dari hasil pengujian enam

Blok yang diteliti tersebut selanjutnya dibahas secara terinci sebagai berikut.

Berdasarkan kriteria ekonomi, hasil estimasi parameter setiap persamaan struktural dalam model yang disusun adalah sesuai harapan. Hal ini ditunjukkan dengan tanda dan besaran nilai estimasi parameter untuk menggambarkan hubungan antara variabel endogen dengan variabel-variabel penjelasnya.

Dengan mendasarkan pada penjelasan di atas selanjutnya digunakan kriteria statistik untuk menguji persamaan yang telah disusun. Hasil estimasi model juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Nilai koefisien determinasi (R^2) setiap persamaan struktural yang sedang yaitu berkisar antara 0,74 sampai dengan 0,99, kecuali untuk persamaan bagi hasil bukan pajak (BHBP) dan dana alokasi umum (DAU) yang bernilai masing-masing 0,44 dan 0,64. Ini menunjukkan bahwa secara umum variabel-variabel penjelas yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan antara 74 persen sampai dengan 99 persen keragaman variabel-variabel endogennya.

Secara konsep, nilai statistik uji-F yang dihasilkan untuk menguji apakah variabel-variabel penjelas yang digunakan berpengaruh nyata terhadap variabel

endogennya semuanya bernilai kurang dari 0,01. Ini berarti variabel-variabel penjelas yang digunakan dalam model secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel endogennya.

Hasil statistik uji-t untuk menguji apakah suatu variabel penjelas secara individu berpengaruh terhadap variabel endogennya atau tidak. Dengan tingkat kesalahan (α) sampai dengan 20 persen menunjukkan bahwa sebagian besar variabel penjelas secara individu berpengaruh nyata terhadap variabel endogennya. Namun terdapat beberapa variabel penjelas dalam model yang secara statistik tidak berpengaruh terhadap variabel endogennya.

Berdasarkan hasil pengujian estimasi parameter tersebut, maka model yang digunakan dalam penelitian ini cukup baik dalam menjelaskan perilaku variabel-variabel ekonomi terhadap keuangan dan perekonomian DKI Jakarta.

Blok Fiskal Penerimaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

a. Pajak Daerah

Hasil pendugaan parameter persamaan penerimaan pajak daerah disajikan pada Tabel 1. Dari Tabel 1 tersebut terlihat bahwa penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh produk domestik regional bruto (PDRB) dan penerimaan pajak pada tahun sebelumnya. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998-1999 juga berpengaruh terhadap penurunan penerimaan pajak di DKI Jakarta.

Parameter dugaan PDRB sebesar 0,008435 dan mempunyai hubungan yang positif. yang menunjukkan bahwa peningkatan PDRB sebesar Rp. 1 miliar berpotensi meningkatkan penerimaan pajak bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 8,44 juta. Ini menunjukkan bahwa semakin besar kapasitas ekonomi suatu wilayah akan memperbesar pendapatan yang diterima oleh pemerintah di daerah tersebut. Hal ini diperkuat faktor usaha DKI Jakarta yang sudah menjadi pusat bisnis dan sentral usaha.

Tabel 1
Hasil Estimasi Parameter Persamaan Penerimaan Pajak Daerah (PAJAK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	-3233482	0,4538	
PDRB	0,008435	0,0054	PDRB (Juta Rp)

SIUP	60,28329	0,2893	Jumlah SIUP (buah)
POP	281,5804	0,5818	Jumlah penduduk (000 orang)
D9899	-865333	0,1249	1998-1999=1, lainnya 0
LPJK	0,318602	0,1937	Lag PJK
Adj-R ² = 0,96936; F-Stat = 146,54; Pr > F = <0,0001; DW = 1,970146			

Penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta juga dipengaruhi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Hal ini dapat dipahami karena dalam menentukan target penerimaan pajak pada tahun tertentu biasanya didasari pada penerimaan pajak tahun sebelumnya.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998-1999 juga berpengaruh terhadap penurunan penerimaan pajak. Ini dikarenakan krisis ekonomi telah menyebabkan kelumpuhan ekonomi di berbagai sektor, banyak perusahaan tutup, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, dan pendapatan riil masyarakat juga berkurang.

Retribusi Daerah

Selain pajak daerah, sumber pendapatan lain adalah retribusi daerah. Hasil pendugaan parameter persamaan penerimaan retribusi daerah disajikan pada Tabel 2 Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi daerah di DKI

Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh penerimaan retribusi pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat dipahami karena dalam menentukan target penerimaan dari retribusi tahun tertentu biasanya didasari pada penerimaan retribusi tahun sebelumnya.

Tabel 2

**Hasil Estimasi Parameter Persamaan Penerimaan
Retribusi Daerah (RET) Provinsi DKI Jakarta
Tahun 1987-2011**

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	-210421	0,7157	
PDRB	0,000135	0,2226	PDRB (Juta Rp)
POP	34,81373	0,6171	Jumlah penduduk (000 orang)
D9899	-112939	0,0999	1998-1999=1, lainnya 0
LRET	0,559504	0,0195	Lag RET
Adj-R ² = 0,73902; F-Stat = 17,28; Pr > F = <0,0001; DW = 2,179869			

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998-1999 juga berpengaruh terhadap penurunan penerimaan retribusi daerah. Ini dikarenakan krisis ekonomi telah menyebabkan kelumpuhan ekonomi di berbagai sektor, banyak perusahaan tutup, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, dan pendapatan riil masyarakat juga berkurang.

Dana Perimbangan

Selain berasal dari pendapatan asli daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menerima transfer dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana alokasi umum.

Bagi Hasil Pajak

Hasil pendugaan parameter persamaan bagi hasil pajak disajikan pada Tabel 3. Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa penerimaan bagi hasil pajak Pemerintah provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh dana bagi hasil pajak pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena dalam menentukan jumlah dana dari bagi hasil pajak ditentukan kapasitas dan penerimaan pajak dari daerah tersebut. Sementara kapasitas dan penerimaan pajak suatu daerah biasanya tidak akan berubah secara drastis dari waktu ke waktu. Selain itu relatif stabilnya dana bagi hasil pajak dari waktu ke waktu juga untuk menjaga keberlangsungan dan kepastian pembiayaan pembangunan di suatu daerah.

Tabel 3.
Hasil Estimasi Parameter Persamaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak (BHP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	-381605	0,3574	
CONCAP	4,976618	0,9488	Konsumsi per kapita (000 Rp)
JMKEND	0,239029	0,2626	Jumlah kendaraan bermotor (unit)
D9899	-455258	0,3564	1998-1999=1, lainnya 0
LBHP	0,755667	0,0170	Lag BHP
Adj-R ² = 0,96909; F-Stat = 181,26; Pr > F = <0,0001; DW = 1,66268			

Bagi Hasil Bukan Pajak

Hasil pendugaan parameter persamaan bagi hasil bukan pajak disajikan pada Tabel 4. Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa penerimaan bagi hasil bukan pajak Pemerintah provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh dana bagi hasil bukan pajak pada tahun sebelumnya. Sebagaimana dana bagi hasil pajak, dalam menentukan jumlah dana dari bagi hasil bukan pajak juga ditentukan kapasitas dan penerimaan bukan pajak dari daerah tersebut. Sementara kapasitas dan penerimaan bukan pajak suatu daerah biasanya tidak akan berubah secara drastis dari waktu ke waktu. Selain itu relatif stabilnya dana bagi hasil bukan pajak dari waktu ke waktu juga akan membantu keberlangsungan dan kepastian pembiayaan pembangunan di suatu daerah.

Tabel 4. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	-14290,2	0,9600	
PDRB	0,000053	0,3892	PDRB (Juta Rp)
POP	4,456294	0,8940	Jumlah penduduk (000 orang)
D9899	31990,59	0,4046	1998-1999=1, lainnya 0
LBHBP	0,517443	0,0232	Lag BHBP
Adj-R ² = 0,44913; F-Stat = 5,69; Pr > F = 0,0035; DW = 2,174886			

Dana Alokasi Umum

Hasil pendugaan parameter persamaan dana alokasi umum disajikan pada Tabel 5. Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa penerimaan dana alokasi umum Pemerintah provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh dana alokasi umum tahun sebelumnya. Sebagaimana dana bagi hasil, dalam menentukan jumlah dana alokasi umum juga ditentukan dari kapasitas dan kebutuhan daerah tersebut. Sementara kapasitas dan kebutuhan daerah biasanya tidak akan berubah secara

drastis dari waktu ke waktu. Selain itu relatif stabilnya dana alokasi umum dari waktu ke waktu juga akan membantu keberlangsungan dan kepastian pembiayaan pembangunan di suatu daerah.

Blok Fiskal Pengeluaran Daerah Struktur pengeluaran pemerintah daerah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam kajian ini blok pengeluaran daerah dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja lainnya.

Tabel 5.
Hasil Estimasi Parameter Persamaan Dana Alokasi Umum (DAU)
Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	87091,79	0,2497	
PDRBCAP	9,706077	0,2799	PDRB per kapita (000 Rp)
CAPFIS	-0,04240	0,2376	Kapasitas fiskal (Juta Rp)
D9899	72967,17	0,6016	1998-1999=1, lainnya 0
LDAU	0,751911	<0,0001	Lag DAU
Adj-R ² = 0,64154; F-Stat = 11,29; Pr > F = <0,0001; DW = 2,153375			

Belanja Pegawai

Hasil pendugaan parameter persamaan belanja pegawai disajikan pada Tabel 6. Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa pengeluaran belanja pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh kapasitas fiskal dan jumlah pegawai yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta serta belanja pegawai tahun sebelumnya.

Parameter dugaan kapasitas fiskal sebesar 0,246922 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti peningkatan kapasitas keuangan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta berpotensi meningkatkan belanja untuk pegawainya.

Sementara parameter dugaan jumlah pegawai sebesar 134997,2 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti penambahan jumlah pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan belanja untuk menggaji pegawainya. Ini dapat dipahami karena setiap penerimaan pegawai baru tentunya harus diikuti dengan anggaran untuk membayar pegawainya.

Tabel 6. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Belanja Pegawai (BLJPEG) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	-1,03E+07	0,1998	
CAPFIS	0,246922	0,0327	Kapasitas fiskal (Juta Rp)
JMPEG	134997,2	0,2038	Jumlah pegawai (000 orang)
D9899	-183184	0,6349	1998-1999=1, lainnya 0
LBLJPEG	0,356997	0,1649	Lag BLJPEG
Adj-R ² = 0,97954; F-Stat = 276,34; Pr > F = <0,0001; DW = 2,130631			

Belanja pegawai Pemprov DKI Jakarta juga dipengaruhi belanja pegawai tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena biasanya pemerintah menyesuaikan gaji pegawainya setiap tahun untuk menyesuaikan berbagai kenaikan harga yang biasanya terjadi setiap tahun.

Belanja Barang dan Jasa

Hasil pendugaan parameter persamaan belanja barang dan jasa disajikan pada Tabel 7. Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa pengeluaran barang dan jasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh kapasitas fiskal dan belanja barang dan jasa tahun sebelumnya.

Parameter dugaan kapasitas fiskal sebesar 0,064452 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti peningkatan kapasitas keuangan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta berpotensi meningkatkan belanja untuk barang dan jasa. Selain itu belanja barang dan jasa

Pemprov DKI Jakarta juga dipengaruhi belanja barang dan jasa tahun sebelumnya.

**Tabel 7
 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Belanja Barang dan Jasa (BLJBRG) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011**

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	-44174,2	0,6529	
CAPFIS	0,064452	0,0882	Kapasitas fiskal (Juta Rp)
D9899	-16934,4	0,9346	1998-1999=1, lainnya 0
LBLJBRG	0,966879	<,0001	Lag BLJBRG
Adj-R ² = 0,98975; F-Stat = 741,64; Pr > F = <,0001; DW = 2,838368			

Blok PDRB

Dalam perekonomian produk domestik regional bruto (PDRB) sangat penting karena indikator ini dapat digunakan untuk mengukur kondisi perekonomian suatu daerah. Selain itu, PDRB juga merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara, wilayah, atau daerah. Dalam teori makro ekonomi, PDB atau PDRB merupakan persamaan identitas dari konsumsi rumah tangga,

investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor.

Konsumsi Rumah Tangga

Hasil pendugaan parameter persamaan total konsumsi rumah tangga disajikan pada Tabel 8. Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa total konsumsi rumah tangga

dipengaruhi secara nyata oleh pendapatan disposable (*disposable income*) dan konsumsi tahun sebelumnya. Krisis yang terjadi tahun 1998-1999 juga mempengaruhi tingkat konsumsi warga DKI Jakarta.

Tabel 8. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Konsumsi Rumah Tangga (CON) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	-1,49E+07	0,6052	
DISP (PDRB-PJK)	0,411207	<0,0001	Disposable income (Juta Rp)
BLJPEG	0,539246	0,7275	Belanja pegawai (Juta Rp)
POP	849,9434	0,8013	Jumlah Penduduk (000 org)
D9899	-6566103	0,1651	1998-1999=1, lainnya 0
LCON	0,323081	0,0177	Lag CON
Adj-R ² = 0,9991; F-Stat = 5099,78; Pr > F = <,0001; DW = 2,150054			

Parameter dugaan pendapatan disposable sebesar 0,411207 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti peningkatan pendapatan disposable berpotensi meningkatkan nilai konsumsinya. Dari nilai parameter tersebut juga dapat diketahui bahwa rata-rata masyarakat DKI Jakarta hanya membelanjakan sekitar 41 persen pendapatan disposablenya untuk konsumsi.

Total konsumsi rumah tangga di DKI Jakarta juga dipengaruhi nilai konsumsi tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena konsumsi barang dan jasa oleh rumah tangga biasanya tidak akan secara drastis berubah tapi mengikuti perubahan pendapatannya, maka biasanya konsumsi

waktu sebelumnya dapat menjadi acuan untuk memperkirakan nilai konsumsi waktu tertentu.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998-1999 juga berpengaruh terhadap penurunan konsumsi rumah tangga. Ini dikarenakan krisis ekonomi telah menyebabkan kelumpuhan ekonomi di berbagai sektor, banyak perusahaan tutup, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, sehingga pendapatan riil masyarakat juga menurun. Penurunan pendapatan ini akab berpengaruh terhadap konsumsinya.

Investasi

Hasil pendugaan parameter persamaan investasi disajikan pada Tabel 9. Pada Tabel 9 tersebut dapat dilihat bahwa nilai

investasi di DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh PDRB dan besarnya tabungan masyarakat yang disimpan di perbankan.

Parameter dugaan PDRB sebesar 0,253027 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti peningkatan PDRB berpotensi meningkatkan nilai investasi yang terjadi. Hasil pendugaan parameter tersebut juga mengindikasikan semakin besar kapasitas perekonomian suatu daerah, maka akan mendorong investasi di daerah tersebut.

Salah satu sumber dana untuk investasi adalah dari perbankan, sementara kredit yang diberikan perbankan sangat dipengaruhi banyaknya tabungan masyarakat yang mereka simpan. Parameter dugaan tabungan masyarakat sebesar 0,329855 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti semakin besar dana tabungan masyarakat yang disimpan di perbankan berpotensi meningkatkan nilai investasi yang terjadi.

Tabel 9. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Investasi (INV) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	-9066593	0,4546	
PDRB	0,253027	0,0005	PDRB (Juta Rp)
SBI	-57973,5	0,9276	Suku bunga (Persen)
TABMAS	0,329855	0,0918	Tabungan masyarakat (Juta Rp)
D9899	2922875	0,8222	1998-1999=1, lainnya 0
LINV	0,128069	0,6134	Lag INV

Adj-R² = 0,9905; F-Stat = 480,36; Pr > F = <,0001; DW = 1,634142

Pengeluaran Pemerintah

Meskipun nilainya relatif kecil, pengeluaran pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam memutar perekonomian di DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan turut serta peran pemerintah

sebagai pembuat regulasi dan pengontrol semua aktivitas perekonomian yang terjadi, serta mendistribusikannya kepada semua lapisan masyarakat aspek yang dibutuhkan

Tabel 10. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Pengeluaran Pemerintah (GOV) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	-1008995	0,7477	
TOTPENGG	2,530814	<0,0001	Total pengeluaran (Juta Rp)
D98	5089540	0,6532	1998=1, lainnya 0

Adj-R² = 0,83365; F-Stat = 58,63; Pr > F = <,0001; DW = 0,335896

Pengeluaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh total belanja yang dianggarkan dalam APBD. Parameter dugaan total belanja (total pengeluaran) sebesar 2,530814 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti peningkatan belanja pemerintah berpotensi meningkatkan peranan pengeluaran pemerintah dalam perekonomian.

Ekspor Barang dan Jasa

Hasil pendugaan parameter persamaan ekspor disajikan pada Tabel 11. Pada Tabel 11 tersebut dapat dilihat bahwa nilai ekspor Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh PDRB, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan nilai ekspor tahun sebelumnya.

Tabel 11
Hasil Estimasi Parameter Persamaan
Ekspor Barang dan Jasa (EKSPOR)
Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	-696127	0,8699	
PDRB	0,313413	0,0006	PDRB (Juta Rp)
KURS	2962,680	0,0043	Nilai tukar Rp thd US\$
D9899	-6025624	0,4410	1998-1999=1, lainnya 0
LEKSPOR	0,385694	0,0305	Lag EKSPOR
Adj-R ² = 0,99585; F-Stat = 1380,45; Pr > F = <,0001; DW = 1,741443			

Parameter dugaan PDRB sebesar 0,313413 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti peningkatan PDRB

berpotensi meningkatkan nilai ekspor barang dan jasa. Hasil pendugaan parameter tersebut juga mengindikasikan semakin besar kapasitas perekonomian suatu daerah, maka akan mendorong ekspor daerah tersebut.

Parameter dugaan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 0,313413 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi meningkatkan nilai ekspor barang dan jasa. Ini terjadi karena melemahnya nilai rupiah terhadap dolar menyebabkan barang di dalam negeri lebih murah daripada di luar negeri sehingga produsen cenderung menjual barangnya di luar negeri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Selain itu, ekspor tahun sebelumnya juga mempengaruhi nilai ekspor tahun sekarang. Ini dapat disebabkan untuk ekspor beberapa komoditi, terutama barang tambang seperti batu bara dan gas alam, biasanya mempunyai kontrak dalam jangka waktu tertentu.

Impor Barang dan Jasa

Hasil pendugaan parameter persamaan impor disajikan pada Tabel 12. Pada Tabel 12 tersebut dapat dilihat

bahwa nilai impor Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh PDRB, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan nilai ekspor tahun sebelumnya.

Parameter dugaan PDRB sebesar 0,56832 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti peningkatan PDRB berpotensi meningkatkan nilai impor barang dan jasa. Hasil pendugaan parameter tersebut juga mengindikasikan semakin besar kapasitas perekonomian suatu daerah, maka akan mendorong impor daerah tersebut. Ini terjadi karena untuk beberapa produk sangat tergantung pada barang-barang impor, sehingga ketika permintaan naik akan meningkatkan impor bahan bakunya.

Tabel 12. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Impor Barang dan Jasa (IMPOR) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	6943441	0,2628	
PDRB	0,56832	<,0001	PDRB (Juta Rp)
KURS	-3249,56	0,0209	Nilai tukar Rp thd US\$
D9899	-5485445	0,6238	1998-1999=1, lainnya 0
Adj-R ² = 0,99163; F-Stat = 909,14; Pr > F = <,0001; DW = 2,372879			

Parameter dugaan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 3249.56 dan mempunyai hubungan yang negatif, yang berarti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi menurunkan nilai impor barang dan jasa. Ini terjadi karena melemahnya nilai rupiah terhadap dolar menyebabkan barang di dalam negeri lebih mahal daripada di luar negeri sehingga produsen cenderung menjual barangnya di dalam negeri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Blok Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar

Indeks Harga Konsumen

Hasil pendugaan parameter persamaan indeks harga konsumen (IHK) disajikan pada Tabel 13. Pada Tabel 13 tersebut dapat dilihat bahwa IHK dipengaruhi secara nyata oleh uang beredar, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga eceran BBM dan IHK tahun sebelumnya. Krisis ekonomi juga berpengaruh terhadap kenaikan IHK.

Tabel 13. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	2,060537	0,0303	
UANGBR	9,99E-06	0,0563	Jumlah uang beredar (Juta Rp)
KURS	0,001296	<0,0001	Nilai tukar Rp thd US\$
HECBBM	0,002289	0,0002	Harga eceran BBM (Rp)
TDL	0,003273	0,4654	Tarif dasar listrik (Rp)
D98	12,29251	<0,0001	1998-1999=1, lainnya 0
LIHK	0,675464	<0,0001	Lag IHK
Adj-R ² = 0,9987; F-Stat = 2950,33; Pr > F = <,0001; DW = 1,700096			

Parameter dugaan uang beredar sebesar $9,99 \times 10^{-6}$ dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti meningkatnya jumlah uang beredar memicu kenaikan IHK dan berarti memicu inflasi. Sementara parameter dugaan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 0,001296 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat memicu inflasi. Ini dikarenakan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan harga di dalam negeri lebih mahal daripada barang luar negeri atau dengan kata lain terjadi kenaikan harga di dalam negeri.

Parameter dugaan harga eceran BBM sebesar 0,002289 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti kenaikan harga BBM dapat memicu kenaikan IHK dan berarti memicu inflasi. Hal ini dikarenakan BBM merupakan

salah satu sumber energy utama bagi dunia usaha, sehingga kenaikan harga BBM akan menyebabkan kenaikan biaya produksi. Akibatnya harga produk yang dihasilkan juga cenderung naik untuk menutupi biaya produksi.

Nilai IHK tahun sekarang juga dipengaruhi nilai IHK tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan inflasi merupakan salah satu indikator sehat tidaknya suatu perekonomian, sehingga perkembangannya selalu dipantau oleh pemerintah. Apabila terjadi gejolak harga yang biasanya ditandai dengan inflasi tinggi, pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya seperti operasi pasar.

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 juga berpengaruh terhadap naiknya IHK. Pada saat terjadi krisis ekonomi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami depresiasi yang cukup tajam, sehingga barang-

barang kebutuhan terutama barang impor mengalami kenaikan tajam. Di lain pihak, pendapatan masyarakat turun drastic baik karena kehilangan pekerjaan maupun menurunnya nilai uang yang mereka pegang.

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat

Tabel 14 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (KURS) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	20,30757	0,9606	
CADEV	-0,00196	0,8613	Cadangan devisa (Juta US\$)
INFLASI	51,78111	0,0011	Tingkat inflasi (Persen)
LKURS	0,966387	<0,0001	Lag KURS
Adj-R ² = 0,93795; F-Stat = 116,89; Pr > F = <,0001; DW = 2,258541			

Parameter dugaan tingkat inflasi sebesar 51,78111 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti terjadinya inflasi dapat memicu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Nilai tukar tahun sekarang juga dipengaruhi nilai tukar tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat perkembangannya selalu dipantau oleh pemerintah karena akan terkait dengan daya saing produk

Hasil pendugaan parameter persamaan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat disajikan pada Tabel 14. Pada Tabel 14 tersebut dapat dilihat bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipengaruhi secara nyata oleh tingkat inflasi dan nilai tukar tahun sebelumnya Indonesia terhadap produk dari luar negeri. Sehingga apabila terjadi gejolak nilai tukar biasanya pemerintah untuk menanggulanginya Bank Indonesia akan mengambil beberapa langkah tertentu untuk mengatasi daya saing produk tersebut seperti operasi pasar.

Jumlah Uang Beredar

Hasil pendugaan parameter persamaan uang beredar disajikan pada Tabel 15. Pada Tabel 15 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah uang beredar di DKI Jakarta dipengaruhi PDRB riil Provinsi DKI Jakarta. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 juga berpengaruh terhadap peredaran uang di DKI Jakarta.

Tabel 15 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Jumlah Uang Beredar (UANGBR) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	-991728	<0,0001	
RPDRB	0,003809	<0,0001	PDRB riil (Juta Rp)
SBI	-3691,86	0,4658	Tingkat suku

			bunga (Persen)
D98	292663,7	0,0468	1998=1, lainnya 0
Adj-R ² = 0,97658; F-Stat = 320,65; Pr > F = <,0001; DW = 2,376742			

Parameter dugaan PDRB riil sebesar 0,003809 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti kenaikan PDRB riil dapat memicu kenaikan uang beredar. Ini dikarenakan kenaikan PDRB yang berarti terjadi kenaikan kapasitas ekonomi akan memerlukan uang yang lebih banyak, sehingga uang beredar juga naik.

Krisis ekonomi tahun 1998 juga berpengaruh terhadap kenaikan uang beredar. Hal ini dikarenakan pada saat krisis terjadi penarikan investasi dalam

bentuk tabungan uang secara besar-besaran karena ketakutan kebangkrutan bank tempat mereka menyimpan uang, sehingga uang beredar di masyarakat meningkat tajam.

Blok IPM, Kemiskinan, dan Lama Sekolah

Indeks Pembangunan Manusia

Hasil pendugaan parameter persamaan indeks pembangunan manusia (IPM) disajikan pada Tabel 16. Pada Tabel 16 tersebut dapat dilihat bahwa IPM di DKI Jakarta dipengaruhi rata-rata lama sekolah.

Tabel 16 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	43,99172	<0,0001	
MYS	2,710559	<0,0001	Rata-rata lama sekolah (Tahun)
UMP	0,006164	0,2326	Upah Minimum Provinsi (000 Rp)
Adj-R ² = 0,72956; F-Stat = 32,02; Pr > F = <,0001; DW = 0,166577			

Parameter dugaan rata-rata lama sekolah sebesar 2,710559 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti kenaikan rata-rata lama bersekolah akan menaikkan IPM. Hal ini dikarenakan rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen penghitungan IPM.

Jumlah Penduduk Miskin

Hasil pendugaan parameter persamaan jumlah penduduk miskin disajikan pada Tabel 17. Pada Tabel 17

tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta dipengaruhi tingkat inflasi dan jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya.

Parameter dugaan tingkat inflasi sebesar 0,973057 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti terjadinya inflasi akan memicu kenaikan jumlah penduduk miskin. Hal ini dikarenakan jika terjadi inflasi maka pendapatan riil masyarakat akan

mengalami penurunan, sehingga garis kemiskinan dapat jatuh menjadi masyarakat yang berada di atas sedikit miskin.

Tabel 17
Hasil Estimasi Parameter Persamaan Jumlah Penduduk Miskin (JUMIS)
Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	133,8099	0,0174	
PDRBCAP	-0,00011	0,6812	PDRB per kapita (000 Rp)
INFLASI	0,973057	0,1789	Tingkat inflasi (Persen)
D9899	41,36422	0,3512	1998-1999=1, lainnya 0
LJUMIS	0,625289	0,0003	Lag JUMIS
Adj-R ² = 0,72226; F-Stat = 15,95; Pr > F = <,0001; DW = 1,696705			

Jumlah penduduk miskin tahun pendapatan masyarakat, selain ada sekarang juga dipengaruhi jumlah kecenderungan orang tua menginginkan penduduk miskin tahun sebelumnya. Hasil anaknya mempunyai pendidikan lebih ini menunjukkan ada kemiskinan baik dibandingkan mereka.

struktural di DKI Jakarta, sehingga Krisis ekonomi yang melanda pada penduduk miskin cenderung mewariskan tahun 1998 juga mempengaruhi kemiskinan tersebut kepada generasi penurunan rata-rata lama bersekolah. Ini berikutnya.

Rata-rata Lama Sekolah

Hasil pendugaan parameter persamaan kebangkrutan, sehingga banyak pemutusan hubungan kerja baik karena Tabel 18. Pada Tabel 18 tersebut dapat perusahaan tempat mereka bekerja tutup dilihat bahwa rata-rata lama sekolah atau karena alasan efisiensi. Akibatnya penduduk DKI Jakarta dipengaruhi rata-rata banyak anak-anak usia sekolah terpaksa rata-rata lama sekolah tahun sebelumnya. Hal berhenti sekolah untuk membantu orang ini dapat terjadi seiring membaiknya tuanya mencari nafkah.

Tabel 18. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	0,652145	0,2104	
PDRBCAP	3,54E-06	0,4706	PDRB per kapita (000 Rp)
D98	-0,38531	0,1368	1998=1, lainnya 0

LMYS	0,943757	<0,0001	Lag MYS
Adj-R ² = 0,98482; F-Stat = 498,23; Pr > F = <,0001; DW = 2,944845			

Jumlah Tenaga Kerja

Hasil pendugaan parameter persamaan jumlah tenaga kerja disajikan pada Tabel 19. Pada Tabel 19 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja DKI Jakarta dipengaruhi PDRB riil dan jumlah tenaga kerja tahun sebelumnya. Krisis ekonomi tahun 1998-1999 juga mempengaruhi jumlah orang yang bekerja di DKI Jakarta.

Standar pengukuran dengan parameter dugaan PDRB riil mempunyai hubungan yang positif dengan jumlah te-

naga kerja yang terserap. Dimana ekonomi yang meningkat akan diikuti oleh pertumbuhan tenaga kerja yang pesat. Hal ini mengandung arti bahwa kenaikan PDRB riil akan menaikkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Hal ini dikarenakan kenaikan kapasitas ekonomi akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak penyerapan ini menjadi aspek positif tersendiri bila dilihat dari standar pengukuran parameter dugaan PDRB tersebut.

Tabel 19.
Hasil Estimasi Parameter Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja (TK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	100,8531	0,4130	
RPDRB	1,82E-06	0,0747	PDRB riil (Juta Rp)
D9899	-220,787	0,1265	1998-1999=1, lainnya 0
LTK	0,728147	0,0002	Lag TK
Adj-R ² = 0,96269; F-Stat = 198,81; Pr > F = <,0001; DW = 2,6218			

Jumlah tenaga kerja yang terserap tahun sekarang juga dipengaruhi jumlah tenaga kerja tahun sebelumnya. Selain itu, krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1998 - 1999 juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Ini terjadi karena saat krisis ekonomi melanda banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, sehingga banyak pemutusan hubungan kerja baik karena

perusahaan tempat mereka bekerja tutup atau karena alasan efisiensi.

PROYEKSI POTENSI FISKAL DKI JAKARTA 2018-2022

Dengan mendasarkan pada perhitungan dan model seperti dijelaskan pada uraian sebelumnya maka hasil proyeksi potensi fiskal DKI Jakarta tahun 2018-2022 dapat diuraikan seperti pada table berikut.

Tabel 20. Nilai Dasar Ramalan Variabel Endogen Tahun 2018 – 2022

No	Endogen	Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	PAD	Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rp)	30,644.2	34,211.4	38,282.5	42,944.9	48,301.8
2.	CAPFIS	Kapasitas Fiskal (Miliar Rp)	46,384.9	51,023.8	56,205.3	62,024.5	68,593.7
3.	TOTREV	Total Penerimaan (Miliar Rp)	52,221.6	57,237.7	62,842.9	69,141.3	76,255.1
4.	GAPFIS	Celah Fiskal (Miliar Rp)	9,909.0	10,293.3	10,577.7	10,733.6	10,727.4
5.	TOTPENGG	Total Pengeluaran (Miliar Rp)	56,293.9	61,317.1	66,783.0	72,758.1	79,321.1
6.	PDRB	Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rp)	2,136,374.4	2,414,563.0	2,735,321.5	3,106,030.0	3,535,437.1
7.	RPDRB	PDRB Riil (Miliar Rp)	1,224,468.0	1,317,475.1	1,418,641.6	1,528,601.7	1,648,126.5
8.	GROWTH	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	7.49	7.60	7.68	7.75	7.82
9.	INFLASI	Tingkat Inflasi (Persen)	4.91	5.04	5.21	5.38	5.57

Sumber: Data hasil olahan

Pemilihan periode 2018-2022 pada analisis ini didasarkan bahwa periode ini merupakan tahapan pembangunan 5 tahunan yang keempat pada RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025. Selain itu periode ini juga merupakan periode Pemerintahan Gubernur terpilih.

Data pada Tabel 20 merupakan hasil proyeksi perekonomian tanpa adanya intervensi kebijakan apapun, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian merupakan kondisi *non-policy* atau kondisi *Business As Usual*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi perekonomian DKI Jakarta tahun 2018-2022 cenderung membaik. Hal ini dilihat dari perkembangan beberapa faktor antara lain: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kapasitas Fiskal (CAPFIS), *Total Revenue* (TOTREV), PDRB, Pertumbuhan Ekonomi (GROWTH) cenderung menaik.

Pendapatan Asli Daerah cenderung terus meningkat. Pada tahun 2018 PAD DKI Jakarta mencapai Rp. 30,6 triliun dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 48.3 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai potensi yang cukup baik dalam mengelola pendapatannya. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi sebagai pengelola kebijakan harus mampu mengelola kondisi

si yang kondusif dalam pembangunan ekonomi.

Dilihat dari sisi PDRB juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 PDRB DKI Jakarta mencapai Rp. 2.136,3 triliun dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 3.535,4 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta terus *sustain*. Ini tentunya perlu terus dijaga. Artinya bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus *pro growth* agar perekonomian tetap berkualitas dan mampu membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Jakarta.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta periode 2018-2022 menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 diperkirakan tumbuh pada kisaran 7,49 persen sementara pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,82 persen.

Dilihat dari sisi inflasi ternyata inflasi DKI Jakarta terus meningkat. Pada tahun 2018 hanya 4,91 persen namun tahun 2022 inflasi diperkirakan mencapai 5,57 persen. Tentunya hal ini memerlukan pengelolaan yang holistik agar inflasi DKI Jakarta dapat terkelola dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi yang terus

meningkat tidak tergerus dengan inflasi yang meningkat.

Dalam hal Kapasitas Fiskal juga ada kecenderungan terus meningkat. Pada tahun 2018 Kapasitas Fiskal DKI Jakarta hanya berjumlah Rp. 46,38 triliun sementara proyeksi untuk tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 68,59 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa potensi fiskal DKI Jakarta sangat pro terhadap pertumbuhan.

Potensi Fiskal yang ditunjukkan dengan indikator yang terus menaik diikuti dengan peningkatan dari Total Penerimaan. Total Penerimaan ada kecenderungan terus meningkat. Pada tahun 2018 Total penerimaan DKI Jakarta berjumlah Rp. 52,22 triliun sementara proyeksi untuk tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 76,25 triliun. Hal ini menunjukkan pengelolaan penerimaan di DKI Jakarta sangat cerdas dalam memanfaatkan momen pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya dalam hal total pengeluaran ada kecenderungan juga terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa total pengeluaran berkorelasi positif. Untuk itu maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyeleksi pengelluaran secara cermat agar kualitas pengeluaran

yang dibelanjakan oleh Pemerintah Daerah dapat dikelola dengan baik. Dikhawatirkan jika pengeluaran tidak dikelola dengan baik akan menjadikan nilai manfaat dari pengeluaran tidak mencapai sasaran. Tentu pada akhirnya masyarakat yang akan menerima dampak negatifnya. Pada tahun 2018 Total pengeluaran DKI Jakarta mencapai Rp. 56,29 triliun sementara proyeksi untuk tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 79,32 triliun.

Gap Fiskal di DKI Jakarta untuk periode 2018-2022 juga menunjukkan kinerja yang membaik karena pada tahun 2022 diproyeksikan gapnya menurun jika dibanding pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkat. Hal seperti ini harus dikelola dengan komprehensif agar kedepannya kinerja fiskal DKI menjadi lebih baik.

SIMPULAN

Periode 2018-2022 merupakan periode tahap ke 4 RPJPD 2005- 2025 sehingga merupakan tahapan strategis dalam pencapaian pembangunan DKI Jakarta. Selain itu periode ini juga merupakan periode Gubernur terpilih sehingga mudah

untuk dilakukan untuk evaluasi dan merupakan periode RPJMD 2018-2022.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta 2018-2022 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Namun dari sisi inflasi angkanya juga terus menunjukkan kenaikan. Untuk itu disarankan agar pertumbuhan ekonomi terus tumbuh berkualitas maka pengendalian inflasi harus terus juga dilakukan dengan berbagai kebijakan terutama kebijakan distribusi. Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih berkualitas.

Kondisi fiskal DKI Jakarta sangat dipengaruhi oleh kinerja perekonomian DKI Jakarta. Jika indikator perekonomian membaik maka kinerja fiskal DKI Jakarta juga membaik. Tentunya akan berlaku sebaliknya jika perekonomian kurang kondusif maka fiskal daerah akan terganggu. Oleh karenanya menjaga *performance* perekonomian Jakarta menjadi hal penting guna meningkatkan kinerja fiskal.

Total penerimaan yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus cenderung meningkat tetapi total pengeluaran juga terus meningkat. Untuk menjadikan kemampuan fiskal DKI

Jakarta terus tumbuh dan berkualitas maka hal yang sangat penting dalam hal ini adalah penyusunan kebijakan pengeluaran terutama belanja daerah yang berkualitas. Artinya bahwa belanja daerah harus selektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2006). Penyusunan Data Basis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat. Kerjasama Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- _____. (2008). *Indek Pembangunan Manusia 2006 – 2007*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- _____. (2009). *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009*. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- Bardhan, P. dan D. Mookherjee. (2005). *Decentralization, Corruption And Government Accountability: An Overview*. For 'Handbook of Economic Corruption' edited by Susan Rose-Ackerman, Edward Elgar. Revised, June.
- Dornbusch, R., S. Fischer and R. Startz. (2004). *Macroeconomics*. Ninth Edition. The McGraw-Hill Company, New York.
- Gujarati, N. D. 1995. *Basic Econometric*. Mc. Graw Hill, New York.
- Hidayat, S. (2010). *Mengurai Peristiwa Meretas Karsa, Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Prisma, 29 (3): 4-22.
- Huang, Y. (2009). *Dynamic Panel Data Evidence on the Finance-Investment Link*. *Journal of Statistics : Advance in Theory and Applications*, November (23): 1-23.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
- Koutsoyiannis, A. (1997). *Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometrics*

- Methods, Second Edition.* Harper and Row Publisher, London.
- Martinez-Vazquez, J. dan M.R.McNab. (2001). Decentralization Fiskal and Economic Growth. International Studies Working paper Series No. 97-7 Andrew Young Schools of Policies Studies. July.
- McCann, P. (2006). Urban and Regional Economics. Oxford University Press, New York.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun (2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun (2000) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun (2010) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014.
- Pyndick, S. R. dan L. D. Rubinfeld. (1997). *Econometric Model dan Economic Forecast, Fourth Edition.* McGraw–Hill International Editions, Boston, Massachussets.
- Rodriguez-Pose, A. dan A. Kroijs. (2009). Fiskal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe. LEQS Paper No. 12. London School of Economics and Political Science. October.
- Simanjuntak, R. (2010). Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi, Urgensi Suatu Grand Design di Indonesia. Prisma, 29 (3): 35-57.
- Sitepu, R. K., dan B. M. Sinaga. (2007). Aplikasi Model Ekonometrika. Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Todaro, M. dan Stephen, S.C. (2006). Economic Development, Ninth Edition. Addison Wesley Harlow, Boston.
- Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

- antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Usman. (2006). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan. Tesis Magister Sains. Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Yurianto. (2012). Dampak Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kinerja Perekonomian Daerah Pada Era Otonomi. Disertasi Doktor, Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Fakultas Ekonomi Manajemen, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.